

EVALUASI PEMERIKSAAN JARAK JAUH KEUANGAN NEGARA PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021

¹Anggana Rachmatya, ²Saifullah Zakaria, ³Jovanscha Qisty Adinda FA

^{1,3}Administrasi Pemerintahan, Universitas Padjadjaran

²Departemen Antropologi, Universitas

E-mail Koresponden: anggana19001@mail.unpad.ac.id

Abstract

The Audit Board of The Republic of Indonesia is a high state institution with the task and authority to conduct examinations of the management and financial responsibilities of the state carried out by the Central Government, Regional Governments, BUMN, BUMD, and other institutions or bodies managing state finances. In 2021, Indonesia was undergoing an adjustment period due to the COVID-19 pandemic. Building on this situation, The Audit Board of Republic of Indonesia has developed a new method for conducting state financial audits, namely the remote audit method. The implementation of remote audits is expected to provide an alternative for auditors when direct audits cannot be carried out. In this study, the author employs the concept of evaluation, which includes explanation, compliance, audit, and accounting related to the research topic. The research utilizes a qualitative method to analyze and describe the phenomenon related to remote financial audits of the state at the The Audit Board of Republic of Indonesia in 2021. The results of the study indicate that remote financial audits of the state at The Audit Board of Republic of Indonesia in 2021 were carried out effectively. However, there were also some obstacles encountered in the implementation of remote audits.

Keywords: *Evaluation, Limitation, Remote Audit, State Financial Audit, The Audit Board of The Republic of Indonesia.*

Abstrak

Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga tinggi negara yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pada tahun 2021 Indonesia sedang berada pada masa penyesuaian yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, sehingga memberikan keterbatasan bagi pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan negara. Berangkat dari hal tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan menciptakan suatu metode baru dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan

negara, yaitu metode pemeriksaan jarak jauh. Dengan adanya pemeriksaan jarak jauh ini harapannya dapat memberikan alternatif bagi pemeriksa ketika tidak dapat menyelenggarakan pemeriksaan secara langsung. Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep evaluasi kebijakan yang terdiri dari eksplanasi, kepatuhan, audit dan akunting yang dikaitkan dengan topik penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk dapat menganalisis dan mendeskripsikan fenomena terkait pemeriksaan jarak jauh keuangan negara pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2021. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan jarak jauh keuangan negara pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tahun 2021 telah dilaksanakan Badan Pemeriksa Keuangan dengan baik. Akan tetapi dalam pemeriksaan jarak jauh tersebut juga terdapat beberapa hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan pemeriksaannya.

Kata Kunci: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Evaluasi, Keterbatasan, Pemeriksaan Jarak Jauh, Pemeriksaan Keuangan Negara.

Latar Belakang

Badan Pemeriksa Keuangan adalah merupakan lembaga tinggi negara yang memiliki tanggung jawab dalam pemeriksaan dan pengelolaan tentang keuangan negara. BPK sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bertujuan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara melalui pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pemeriksaan keuangan negara tersebut merupakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan tujuan tertentu.

Selanjutnya, pada tahun 2021 kondisi Indonesia sedang berada pada masa penyesuaian setelah dilanda pandemi global yang mengakibatkan segala keperluan menjadi dibatasi, termasuk dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Namun dengan adanya pembatasan tersebut fungsi pemerintah seharusnya tetap berjalan dengan memunculkan alternatif lain untuk menyelesaikan pekerjaan terutama yang berhubungan dengan fungsi pemerintah. Berangkat dari hal tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menciptakan suatu metode baru dalam melakukan pemeriksaan keuangan, yaitu dengan menggunakan metode pemeriksaan jarak jauh. Dalam pemeriksaan jarak jauh, pemeriksaan akan lebih banyak memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dan *big data analytics*

Dalam suatu riset, seorang peneliti haruslah menentukan terlebih dahulu metode penelitian yang hendak digunakan. Penentuan metode didasarkan pada fenomena yang diangkat dalam suatu penelitian yang berhubungan dengan tujuan dari penelitian itu sendiri. Dalam riset terapan

ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Alasan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif karena fenomena yang terjadi di dalam riset terapan ini masih bersifat umum dan remang-remang sehingga penulis melakukan pengkajian lebih mendalam dengan cara terjun ke lapangan, yakni pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Berdasarkan penjelasan di atas, di dalam riset terapan ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena terkait pemeriksaan jarak jauh yang dilakukan pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2021. Dalam hal ini, peneliti juga memastikan ke lapangan terkait permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan keuangan dengan metode jarak jauh.

Di dalam riset terapan ini, penulis akan menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu studi lapangan dan studi pustaka

Seseorang yang akan menjadi informan pada penelitian ini akan dipilih berdasarkan pemahaman, pengalaman serta keterlibatan informan dalam pelaksanaan Pemeriksaan Jarak Jauh Keuangan Negara pada Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2021. Sehingga peneliti meminta informasi dan data kepada yang dianggap mempunyai kuasa yaitu satu orang Pemeriksa pada Ditama Revbang BPK RI, satu orang Kepala Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara Badiklat PKN BPK RI, dan tiga orang Auditor Utama Keuangan Negara (AKN) IV. A BPK RI untuk memperoleh informasi terkait pelaksanaan teknis dari pemeriksaan jarak jauh keuangan negara pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Pada proses ini data yang akan dianalisis berasal dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara melakukan penyortiran data sehingga akan ditemukan data yang penting dan tidak. Selain menggunakan teknik analisis data yang telah dikemukakan diatas, peneliti juga akan menggunakan teknik analisis SWOT dalam menganalisis data.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik validasi menurut Sugiyono (2013) yaitu teknik triangulasi sumber dan bahan referensi. Penelitian ini akan dilakukan pada Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan di Kantor Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini membahas evaluasi pemeriksaan jarak jauh keuangan negara pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tahun 2021. Untuk mendeskripsikan lebih lanjut terkait pemeriksaan jarak jauh keuangan negara pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tahun 2021, konsep evaluasi kebijakan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu fungsi evaluasi kebijakan menurut Wibawa (Akbar dan Mohi, 2018:19) yang terdiri dari eksplanasi, kepatuhan, audit dan akunting. Selain itu peneliti juga akan melakukan analisis strength, weakness, opportunity dan threats (SWOT) dalam pemeriksaan jarak jauh keuangan negara pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tahun 2021.

1. Eksplanasi

Dalam pelaksanaannya pemeriksaan jarak jauh keuangan negara ini dapat

memberikan manfaat bagi pemeriksa BPK RI dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dengan kelebihan-kelebihan yang terdapat dalam pelaksanaannya, dan tidak hanya pemeriksa BPK RI sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang merasakan manfaat dari kelebihan-kelebihan yang ada dalam pemeriksaan jarak jauh tersebut, tetapi entitas yang diperiksa oleh BPK RI juga merasakan manfaat dan turut terbantu dari kelebihan-kelebihan yang terdapat dalam pelaksanaan pemeriksaan jarak jauh keuangan negara tersebut.

2. Kepatuhan

Berdasarkan poin kepatuhan, dapat diketahui para pelaku yang terlibat dalam pemeriksaan jarak jauh juga telah melaksanakan pemeriksaan jarak jauh sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Standar utama yang digunakan oleh pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, yaitu Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Tahun 2017. Selain itu terdapat pedoman-pedoman, panduan, petunjuk pelaksanaan dan juga petunjuk teknis pemeriksaan, yang mengatur secara lebih terperinci untuk dapat memberikan pedoman dan panduan kepada pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan.

3. Audit

Berdasarkan poin audit, dapat diketahui dalam pemeriksaan jarak jauh ini, mulai dari proses perencanaan pemeriksaan,

kemudian pelaksanaan pemeriksaan, hingga penyusunan laporan hasil pemeriksaan (LHP) sebagai bentuk output dari pemeriksaan yang dilakukan, telah dilaksanakan BPK RI dengan tanpa adanya penyimpangan dalam setiap proses pelaksanaan pemeriksaannya.

4. Akunting

Berdasarkan point akunting, dapat diketahui dengan adanya kebijakan pemeriksaan jarak jauh ini telah memberikan dampak positif terhadap sosial dan ekonomi masyarakat. Hal tersebut karena dalam pemeriksaan jarak jauh ini, pemeriksa tetap dapat melaksanakan pemeriksaan walaupun pada tahun 2021 sedang mengalami keterbatasan dalam melaksanakan segala kegiatan. Selain itu juga dengan pemeriksaan jarak jauh dapat menghemat anggaran pemerintah, sehingga anggaran pemerintah pada tahun 2021 dapat difokuskan pada penanganan sektor-sektor yang saat itu sangat terdampak oleh pandemi *COVID-19*.

Analisa SWOT

Berdasarkan analisa strength, weakness, opportunity, dan threats yang dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui kelebihan dan peluang yang terdapat dalam pemeriksaan jarak jauh ini, adalah adanya pemanfaatan berbagai macam teknologi dan informasi dalam pemeriksaan yang dapat membantu dan mempermudah pemeriksaan, terjadinya efisiensi dan penghematan anggaran keuangan negara, berkurangnya hambatan geografis dalam pemeriksaan, pemeriksaan menjadi lebih efisien dalam waktu dan tempat pelaksanaan pemeriksaan,

proses pemeriksaan menjadi dapat dilakukan secara berulang-ulang, bertambahnya sample pemeriksaan dan memperluas cakupan pemeriksaan, serta meningkatnya kerjasama BPK dengan pihak eksternal seperti tenaga ahli atau spesialis pada bidang-bidang tertentu yang dibutuhkan dalam pemeriksaan jarak jauh, mendapatkan dukungan dari Badiklat PKN BPK RI, serta keterlibatan semua pihak dalam pemeriksaan juga menjadi lebih memungkinkan dengan pemeriksaan jarak jauh ini.

Untuk hambatan dan ancaman yang terdapat dalam pemeriksaan jarak jauh sebagian besar berasal dari entitas yang diperiksa oleh BPK atau yang biasa disebut dengan auditee. Hambatan dan ancaman tersebut diantaranya seperti jaringan internet yang kurang baik pada beberapa wilayah yang akan di uji pemeriksaan, beberapa auditee belum siap ataupun terbiasa dengan teknologi dan informasi yang digunakan dalam pemeriksaan jarak jauh, terdapat *blindspot* dari auditee yang tidak terjangkau oleh pemeriksa pada saat pemeriksaan, keamanan informasi dalam pemeriksaan, dan kemungkinan pemeriksa mendapatkan pernyataan yang tidak objektif dari entitas yang diperiksa.

Simpulan

1. Berdasarkan konsep evaluasi kebijakan menurut Wibawa (Akbar dan Mohi, 2018:19) yang terdiri dari eksplanasi, kepatuhan, audit dan akunting, dapat diketahui Pemeriksaan Jarak Jauh Keuangan Negara pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2021 telah dilaksanakan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan baik. Hal tersebut dapat terjadi karena berbagai macam kelebihan yang terdapat dalam pemeriksaan jarak jauh, pelaksanaan pemeriksaan yang dilaksanakan juga telah sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan, tidak adanya penyimpangan dalam setiap proses pelaksanaan pemeriksaannya, hingga memberikan dampak positif kepada sosial dan ekonomi masyarakat.
2. Berdasarkan hasil dari identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang telah dilakukan oleh penulis, penulis dapat menyimpulkan dalam pelaksanaan pemeriksaan jarak jauh keuangan negara pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tahun 2021 telah dilaksanakan dengan cukup baik, namun masih terdapat beberapa hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaannya. Namun, beberapa hambatan yang ada tersebut tidak menjadi penghalang bagi BPK RI dalam melaksanakan pemeriksaan jarak jauh keuangan negara yang, karena BPK RI telah berupaya dan akan terus berupaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terdapat pada pemeriksaan jarak jauh tersebut.
3. Upaya yang perlu dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia berdasarkan hasil analisis SWOT yang ditinjau dari kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, serta dari hambatan-hambatan yang terdapat pada poin eksplanasi, maka Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam melaksanakan pemeriksaan jarak jauh keuangan negara perlu untuk semakin mengoptimalkan penggunaan Big Data Analytics (BIDICS) dan berbagai

macam teknologi dan informasi yang ada dalam pemeriksaan jarak jauh. Selain itu Badan Pemeriksa Keuangan juga dapat lebih meningkatkan pendidikan dan pelatihan (Diklat) kepada para pemeriksa untuk meningkatkan kompetensinya dalam melaksanakan pemeriksaan jarak jauh, dan juga dalam menggunakan teknologi dan informasi yang digunakan dalam pemeriksaan jarak jauh. Selanjutnya Badan Pemeriksa Keuangan juga dapat lebih meningkatkan sosialisasi pemeriksaan jarak jauh kepada para auditee agar nantinya tidak ada lagi auditee yang belum siap ataupun belum terbiasa dengan pelaksanaan pemeriksaan jarak jauh. Selain itu Badan Pemeriksa Keuangan juga dapat mengkolaborasikan pelaksanaan pemeriksaan jarak jauh dengan pemeriksaan konvensional.

References

Buku

Akbar, Muh. Firyal., & Mohi, Widya Kurniati. (2018). *Studi Evaluasi Kebijakan*. Gorontalo : Ideas Publishing

Anggara, Sahya. (2016) *Administrasi Keuangan Negara*. Bandung: Pustaka Setia Bandung

Labolo, Muhadam. (2013). *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Syafiie, Inu Kencana, 2013. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Rineka Cipta.

Syafiie, Inu Kencana, 2014. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. (2013). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D*. ALFABETA, cv

Nuraini, F. (2016). *Teknik Analisis SWOT*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.

Jurnal

Ariyanto, Sanusi. (2022). *Pengaruh Pelaksanaan Remote Audit Terhadap Kinerja Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Riau Selama Masa Pandemi*. *Journal of Islamic and Accounting Research*, 1(1), 20–30.

Mulya, Ade. (2018). *Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Fungsi Pemeriksaan Terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah*. Vol. 2(4) November 2018, pp. 700-708 ISSN : 2597-6885 (online)

Pertiwi, D., Sonjaya, Y., & Sutisman, E. (2022). *Analisis dampak pandemi Covid-19 terhadap pelaksanaan prosedur audit di Indonesia*. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 4, 201–210. <https://doi.org/10.20885/ncf.vol4.art26>

Suryani, M. S. (n.d.). *Implementation Of Audit Of Local Government Financial Statements By Bpk Representative Of West Sumatra Province During The Covid-19 Pandemic*. 19.

Wulan, Ana Ratna. *Pengertian dan Esensi Konsep Evaluasi, Asesmen, Tes dan Pengukuran*. Jurnal FMIPA Universitas Pendidikan Indonesia.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara
Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara Bahwa
Perencanaan, Pelaksanaan dan
Pelaporan Hasil Pemeriksaan Keuangan
Negara
Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006
tentang Badan Pemeriksaan Keuangan
Permenpan Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penataan Tatalaksana (*Business
Process*)
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara Dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus 2019
Dan/Atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas
Sistem Keuangan

Sumber Lainnya

Badan Pemeriksa Keuangan. (2020).
Ragam Opini BPK.
[https://www.bpk.go.id/news/ragam-
opini-bpk](https://www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk) Diakses 28 Oktober 2023

Badan Pemeriksa Keuangan. (2021).
Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan.
<https://e-ppid.bpk.go.id/lhp> Diakses 28
Maret 2023

Badan Pemeriksa Keuangan. (2022).
*Apa Itu Enam Pilar Pengendalian Mutu
Pemeriksaan* BPK.
<https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=3>

[5527](#) Diakses 17 September 2023

Permana, F. Y. (2022). *Pemeriksaan
Jarak Jauh, Adaptasi Baru Di Era “New
Normal.”*

[https://www.bpk.go.id/news/pemeriksa
an-jarak-jauh-adaptasi-baru-di-era-
new-normal](https://www.bpk.go.id/news/pemeriksaan-jarak-jauh-adaptasi-baru-di-era-new-normal) Diakses 28 Maret
2023

Badan Pemeriksa Keuangan (2023). *Big
Data Analytics*.
[https://www.bidics.bpk.go.id/introducti
on](https://www.bidics.bpk.go.id/introduction) Diakses 15 September 2023

Acknowledgement

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk dapat melakukan penelitian. Serta peneliti mengucapkan terimakasih kepada seluruh informan yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk dapat penulis lakukan wawancara, sehingga dapat memberikan informasi, pengetahuan, dan membantu peneliti dalam menyusun Tugas Akhir yang berjudul Evaluasi Pemeriksaan Jarak Jauh Keuangan Negara Pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2021.